BAB III

Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

3.1 Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan kuliah kerja praktek yang dilaksanakan selama satu bulan yaitu penulis ditempatkan di bagian Kasubag administrasi dan umum Inpektorat Provinsi Jawa Barat. Dalam pelaksanaan tersebut bidang kajian yang diambil penulis adalah fungsi inspektorat dalam melaksanakan audit guna menunjang retribusi daerah, karena fungsi inspektorat dalam mengaudit dirasakan sangat penting dan berperan dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari yang membantu instansi dalam hal pengawasan terhadap kegiatan atau program instannya yang bekaitan. Pelaksanaan kuliah kerja praktek pada bagian subbagian administrasi dan umum penulis dibimbing oleh Bapak H.Suhanda serta staf kasubag administrasi dan umum inspektorat provinsi jawa barat.

3.1.1 Pengertian Fungsi

Menurut **Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah (2006:8)**, fungsi (function) didefinisikan sebagai :

“Serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya.”

Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:322)**, fungsi didefinisikan sebagai berikut :

1. **Jabatan (Pekerjaan) yang dilakukan**

2. Kegunaan suatu hal

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi memiliki arti pekerjaan dan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam menajemen dan ditentukan berdasarkan status yang ada padanya.

Untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan yang baik, diperlukan suatu perencanaan serta pelaksanaan system yang memadai dengan memperlihatkan pengendalian yang efektif serta pelaporan yang tepat waktu untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan yang akan diambil baik masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.

3.1.2 Pengertian Audit

Menurut **Mulyadi (2002:9)** audit didefinisikan sebagai berikut :

"Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan criteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan."

Secara umum pengertian di atas dapat diartikan bahwa audit adalah proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan

memberikan pendapat mengenai kawajaran laporan keuangan tersebut.

Sedangkan pengertian Audit menurut **Henry Simamora (2002:4)** adalah sebagai berikut :

"Suatu proses sistematik pencarian dan pengevaluasian secara obyektif bukti mengenai asersi tentang peristiwa dan tindakan ekonomik untuk meningkatkan kadar kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan".

Dari definisi diatas dapat diketahui unsur-unsur penting dalam audit yaitu audit merupakan suatu proses sistematik yang bersifat logis, terstruktur, dan terorganisir. Proses sistematis yang dilakukan tersebut merupakan proses untuk menghimpun bukti-bukti yang mendasari asersi-asersi yang dibuat oleh individu maupun entitas yang kemudian dievaluasi oleh auditor.

Dalam melaksanakan audit faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah:

1. Dibutuhkan informasi yang dapat diukur dan sejumlah criteria (standar) yang dapat digunakan sebagai panduan untuk mengevaluasi informasi tersebut.
2. Penetapan entitas ekonomi dan periode waktu yang diaudit harus jelas untuk menentukan lingkup tanggung jawan auditor.

3. Bahan bukti harus diperolah dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi tujuan audit.
4. Kemampuan auditor memahami kriteria yang digunakan serta sikap independen dalam mengumpulkan bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan yang akan diambilnya.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis ditempatkan pada kasubag administrasi dan umum yang memiliki fungsi untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan, pengelolaan perlengkapan dan pengelolaan urusan kepegawaian Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Melaksanakan pengelolaan administrasi meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian meliputi penyiapan bahan dan penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan dan kesejahteraan pegawai.

Selama penulis melakukan kuliah kerja praktek, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengambil data pada Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Barat mengenai fungsi inspektorat. Data tersebut diambil untuk bahan laporan kuliah kerja praktek.
2. Mengentry data pengeluaran dan penerimaan kas ke komputer.
3. Mengentry data hadir setiap bulan pegawai.

4. Membantu menghitung belanja barang perlengkapan kantor.

3.3 Hasil Kerja Praktek

3.3.1 Apakah Inspektorat Sudah Melaksanakan Fungsinya Dengan Baik.

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemrintahan di Kabupaten/Kota.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokoknya inspektorat mempunyai fungsi penyelenggarakan perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, monitoring,review dan penilaian.

Inspektorat melaksanakan program pengawasan dengan menyusun rencana strategis untuk kemajuan Daerah. Rencana strategis inspektorat disusun dengan memperhatikan analisis perkembangan strategis yang meliputi :

Kondisi saat ini inspektorat provinsi jawa barat :

a. Laporan hasil pengawasan segera ditindak lanjuti tepat waktu oleh audit sehingga menjadi temuan yang baru aparat pengawasan ekternal.

b. Peran pengawasan sebagai bagian dari fungsi manajemen di satuan kerja baik.
c. Anggaran pengawasan inspektorat provinsi jawa barat belum memadai sehingga kegiatan review hanya terlaksana 50% kegiatan monitoring dan evaluasi hanya terlaksana 10%, evaluasi pelaksanaan kebijakan hanya 3 (tiga) obyek kebijakan pertahun, Diklat Pembentukan dan Penjenjangan Auditor serta Diklat Peningkatan kompetensi substansi Auditor sedikit terhambat.
d. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur.
e. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap aparatur yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Melihat kondisi terkini inspektorat provinsi jawa barat yang bisa dikatakan masih labil, fungsi inspektorat yang menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan perencanaan program pengawasan dapat dikatakan inspektorat provinsi jawa barat belum sepenuhnya melaksanakan fungsinya dengan baik atau belum sesuai dengan peraturan gubernur jawa barat.

3.3.2 Bagaimana Tata Cara Inspektorat Melaksanakan Audit, Apakah Sudah Baik

Inspektorat provinsi jawa barat dalam mengaudit menggunakan prosedur atau tatacara yang telah ditetapkan. Tatacara inspektorat dalam mengaudit yaitu dimulai dari persiapan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan audit serta diakhiri dengan pemantauan tindak lanjut. Sedangkan bentuk laporan hasil audit (LHA) disajikan dalam bentuk bab.

LHA disajikan dalam bentuk bab dimaksudkan untuk melaporkan hasil audit atas pelaksanaan tugas dan kegiatan secara menyeluruh meliputi aspek tugas pokok dan fungsi dan aspek-aspek pendukungnya (Laporan audit khusus dan evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja) di tambah uraian singkat hasil audit/evaluasi lainnya. LHA disampaikan kepada Inspektur.

Selain memiliki tatacara mengaudit Inspektorat provinsi jawa barat juga memiliki prosedur audit sehingga proses audit menjadi semakin terinci. Prosedur audit Inspektorat provinsi jawa barat dapat diuraikan menjadi beberapa tahap. Prosedur audit yang akan diuraikan yaitu prosedur audit kas adalah sebagai berikut :

1. Lakukan *cash count* atas kas yang ada (menghitung kas).
2. Catat hasil perhitungan kas dalam cash count sheet (lembar perhitungan kas).
3. Bandingkan hasil perhitungan fisik dengan saldo kasnya per tanggal cash count.
4. Membuat berita acara pemeriksaan kas dan ditanda tangani oleh petugas.
5. Membuat perhitungan maju ketanggal neraca sebagai berikut :

Saldo per cash count 20/12/2010	Rp xxx
Mutasi :20 s/d 31 Des 2010	
penerimaan	Rp xxx
pengeluaran	(Rp xxx)
Saldo per audit 31.12.2010	Rp xxx
Saldo per book 31.12.2010	(Rp xxx)
Selisih	Rp xxx

6. Cash count dilakukan setelah tanggal neraca perhitungan mundur adalah sebagai berikut :

Saldo per cash count 15/12/2011	Rp xxx
Mutasi : 1 s/d 14 jan 2011	
Penerimaan	Rp xxx
Pengeluaran	(Rp xxx)

Saldo per audit 31/12/2010	Rp xxx
Saldo per book 31/12/2010	(Rp xxx)
Selisih	Rp xxx

7. Membandingkan saldo per audit dengan saldo legdernya per 31 des.
8. Mengirim konformasi bank.
9. Memeriksa rekonsiliasi bank.

3.4 Pembahasan Kerja Praktek

Inspektorat provinsi jawa barat dalam melakukan fungsinya yakni menyelenggarakan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, monitoring, review dan penilaian masih belum terlaksana dengan baik dikarenakan hambatan yang masih banyak.

Hambatan-hambatan yang dialami inspektorat provinsi jawa barat dalam melaksanakan program pengawasan yaitu dalam menyusun rencana strategis, dalam menyusun rencana strategis inspektorat provinsi jawa barat memperhatikan analisis perkembangan strategis yang telah diuraikan pada hasil kerja praktek di atas.

Hambatan inspektorat provinsi jawa barat dipengaruhi oleh laporan hasil pengawasan yang tidak segera ditindak lanjuti tepat waktu oleh audit sehingga tidak

ditemukan temuan yang baru aparat pengawasan ekternal. Anggaran pengawasan inspektorat provinsi jawa barat yang belum memadai sehingga kegiatan review terlaksana tidak optimal.

Sedangkan tata cara inspektorat provinsi jawa barat dalam mengaudit yang dimulai dari persiapan audit dirasa sudah cukup karena sebelum melakukan audit auditor telah memahami kondisi dari inspektorat itu sendiri, dan dalam pelaksanaan auditnya juga terstruktur karena auditor telah mengatur pelaksanaan audit.

Pelaporan hasil audit pun menghasilkan laporan yang dapat dipercaya karena auditor sebelum menyerahkan hasil audit sesuai dengan temuannya dan auditor telah melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap laporan hasil audit serta laporan hasil audit disajikan dalam bentuk bab, sehingga mempermudah dalam mereview laporan hasil audit.